

GRUP STUDI "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" (draft)

Maksud grup studi kecil ini ialah menjajagi implikasi2 konsepsi sustainable development (pembangunan kesinambungan) untuk Indonesia. Perlunya konsepsi ini diterapkan di Indonesia sudah tertera didalam GBHN tahun 1988. Implikasi2nya untuk sebagian sudah dituangkan dalam ketentuan2 Repelita V. Meskipun demikian sangat perlu implikasi2 jangka lebih panjang dikaji, dan dimana data atau alat2 analisis yang diperlukan untuk usaha ini belum tersedia, setidaknya2nya studi ini hendaknya mengidentifikasikannya, agar dapat menjadi pedoman untuk riset selanjutnya yang lebih teliti dan lengkap.

Sekarangpun sudah dapat dibayangkan bahwa SD (sustainable development) akan mempunyai konsekwensi2 yang sangat besar, baik untuk pola pembangunan kita, maupun untuk nilai2 dan etik pembangunan. Studi ini hendak meninjau akibat2 ini beserta implikasi2 dibidang kebijaksanaan umum (public policy) serta di bidang usaha masyarakat sendiri, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian ini diharapkan bahwa grup ini dapat memberi sumbangan yang berarti kepada usaha pemerintah dan masyarakat luas di bidang pembangunan yang berkesinambungan., atau setidaknya2nya merangsang para pakar maupun masyarakat awam turut memikirkan dan menyadari persoalan yang amat penting ini.

Pangkal tolak kita ialah interaksi antara penambahan jumlah penduduk, usaha pembangunan dan keperluan menjaga , mengelola dan melestarikan landasan sumber daya alam (natural resources base), dan perlunya mencari keseimbangan antara keperluan2 yang berbeda dan sering bertentangan ini. Dengan sendirinya teknologi meru-pakan faktor penting dalam menentukan titik keseimbangan itu.

Disamping itu dampak perubahan dalam sistem2 lingkungan hidup global atas situasi negeri kita, dan interaksinya dengan usaha pembangunan kesinambungan kita. Perlu ditinjau juga peran yang akan harus dimainkan oleh Indonesia didalam kerja sama internasional yang diperlukan untuk menjaga kelestarian sistem2 penopang hayat di bumi (" global life support systems") sambil menjaga kepentingan nasional Indonesia. Bahaya kebijaksanaan2 internasional mengenai dimensi2 global ini ditentukan terutama oleh negara2 industri tanpa memperhitungkan kepentingan2 dunia ke-tiga, tidak kecil.

Dalam menentukan popok2 diskusi kita, kita dapat mengikuti rincian masalah seperti dilakukan oleh Panitya Brundtland dalam Lapurannya

Hari Depan Kita Bersama. Rincian itu meliputi:

1. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.
2. Keamanan Pangan: menjaga potensinya.
3. Ekosistem dan Jenis2 Biota
4. Enerji: pilihan untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
5. Industri: meningkatkan produksi sambil mengurangi bahan.
6. Tantangan perkotaan.
7. Kerja sama internasional dan perubahan2 kelembagaan.

Kita juga dapat memakai rincian lain, yang akan lebih mendekati diskusi dengan masalah2 antara usaha pembangunan, kependudukan dan lingkungan hidup, yang sekarang sudah mulai dirasakan di dalam masyarakat kita sendiri.

-Berpangkal pada suatu diskusi mengenai batas2 daya topang ("carrying capacity") pulau Jawa misalnya, dapat dibuka analisis untuk membahas pola pembangunan seluruh Indonesia.

-Meningkatnya dualisme ekonomi dan batas2 pada yang dinamakan "social sustainability" juga dapat merupakan titik tolak.

-Kaitan antara konsepsi Sustainable Development dengan nilai2 Pancasila dan budaya kita merupakan janglan lain pula.

Maka cara kita akan mendekati tema kita perlu kita bicarakan pada pertemuan pertama kita.

Bagaimanapun acara disusun, sebaiknya setiap diskusi dimulai dengan uraian seorang pakar di bidang yang bersangkutan, agar supaya fakta2 sejauh kita mengetahuinya dapat di beberkan sebagai landasan pembicaraan kita.

Dibayangkan bahwa lima diskusi, yaitu sekali sebulan, akan dapat mewujudkan suatu laporan sementara yang berbentuk agenda yang cukup terinci tapi juga cukup koheren untuk keaktifan seterusnya, baik oleh grup

3.

ini, bila dianggap tepat, atau oleh grup2 atau lembaga lain. Dengan cara demikian juga akan dapat dipastikan untuk bidang2 mana pengetahuan ilmiah masih kurang sehingga tidak dapat di pastikan kebijaksanaan2 semacam apa yang tepat.

Perlu pula disihkan waktu untuk meninjau peran yang harus di mainkan oleh Pemerintah, oleh parlemen, oleh LSM dan oleh sektor swasta dan pendidikan.

Akhirnya, sebaiknya seri diskusi ini dibuka oleh sdr. Menteri KLH Emil Salim.

6 April 89